



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



**KPKNL TARAKAN**

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

MENUJU STABILITAS EKONOMI  
TETAP OPTIMIS & WASPADA

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan Tahun 2023 dengan sistematika yang ditentukan.

Kami berharap LAKIN ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tarakan. Kepada semua pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Tarakan, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Tarakan



Ditandatangani secara elektronik  
Doni Prabudi



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Tarakan dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang disampaikan kepada *stakeholder* melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Tarakan tahun 2023. Laporan tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi DJKN, yaitu

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Kekayaan Negara adalah KPKNL Tarakan sebagai lembaga/institusi vertikal DJKN di daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang di lingkup wilayah kerja Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Profesional adalah melaksanakan pelayanan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah memberikan pelayanan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Tarakan untuk periode 2020 s.d. 2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Tarakan yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KPKNL Tarakan telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa
3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal
4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif
6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif
7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif
8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal
9. Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif
10. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Tarakan. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Tarakan Tahun 2023, telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) IKU yang merupakan Kontrak Kinerja DJKN Tahun 2023, yaitu:

Sasaran Program Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal 2023	Target Addendum 2023	Realisasi 2023 (Raw)	Realisasi 2023 (%)
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10.190.000.000		11.252.006.334,82	110,42%
	1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%			131,30%
	1c-CP Indeks Integritas	88,67		89,17	100,56%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	145.500.000.000		135.848.256.078	93,37%

Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	750.000.000	928.282.813	1.029.668.459	110,92%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	84%			118,17%
	3b-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10	12	13	108,33%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%		0,43%	198,28%
	4b-CP Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70		98	139,51%
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%		-	106,38%
	5b-CP Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%			116,28%
	5c-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	107			116,71%
Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%			116,28%
Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80		100,00	125,00%
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100			112,48%
	8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%			127,00%
	8d-CP Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%		0,00%	200,00%
Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	9a-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60		99,14	165,23%

Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80		85,49	106,86%
	10b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%			120,00%

Untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2023, KPKNL Tarakan telah berhasil mencapai target atas 19 (sembilan belas) dari 20 (dua puluh) IKU dan memperoleh nilai kinerja organisasi dengan kategori hijau. Dan hanya terdapat 1 (satu) IKU yang kategori kuning yaitu Persentase realisasi pokok lelang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Pelelang yang tidak laku terjual (lelang UUHT)
- b. Objek lelang tidak *marketable*
- c. Terdapat kebijakan baru dari Pegadaian (*rollover*/perpanjangan utang) perubahan jadwal lelang dari 1 bulan 2 kali menjadi 1 bulan 1 kali

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	2
<b>A. PENJELASAN UMUM</b> .....	<b>2</b>
1. Profil Kantor .....	2
2. Tugas dan Fungsi.....	2
3. Struktur Organisasi.....	3
<b>B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI</b> .....	<b>5</b>
<b>C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE) ORGANISASI</b> .....	<b>7</b>
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
<b>A. Rencana Strategis KPKNL Tarakan</b> .....	<b>9</b>
<b>B. Kontrak Kinerja KPKNL Tarakan</b> .....	<b>14</b>
BAB III AKUNTABILITAS KERJA.....	20
<b>A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI</b> .....	<b>20</b>
1. Membandingkan Target Awal Tahun dan Realisasi Kinerja Tahun ini .....	24
2. Membandingkan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Periode Sebelumnya .	25
a. Capaian Kinerja Dalam Kurun Waktu Sampai Dengan Lima Tahun Terakhir .....	25
b. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah.	29
c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Rencana Kerja Kemenkeu Tahun 2023 .....	31
3. Upaya-upaya effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja .....	32
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan..	34
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	36
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	38
7. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko.....	39
8. Rencana Aksi ke Depan.....	40
<b>B. REALISASI ANGGARAN</b> .....	<b>42</b>
1. Pendapatan KPKNL TARAKAN .....	42
2. Belanja KPKNL TARAKAN.....	42
BAB IV PENUTUP .....	43
<b>A. SIMPULAN</b> .....	<b>43</b>
<b>B. LANGKAH DI MASA MENDATANG</b> .....	<b>43</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. PENJELASAN UMUM**

### **1. Profil Kantor**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Jalan Halmahera No. 175, Pamusian Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Tarakan meliputi:

1. Kota Tarakan;
2. Kabupaten Bulungan;
3. Kabupaten Malinau;
4. Kabupaten Nunukan; dan
5. Kabupaten Tana Tidung.

KPKNL Tarakan dipimpin oleh Kepala Kantor Doni Prabudi, dibantu Kepala Subbagian Umum Aziz Kurniawan, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Chusaeri, Kepala Seksi Piutang Negara Lopianus Bubu, Kepala Seksi Hukum dan Informasi Melliana Andriani Susanto, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Eko Budi Hariyanto, serta Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Muda Christina Dewi Sitompul, Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama Supyansyah Nyong Goni, dan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama Yohanes Eko Dedi Kurniawan, Andri Hermawan, dan Maharani Kumalasari. Dalam memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang, KPKNL Tarakan diperkuat dengan sumber daya manusia berjumlah 30 orang yang terdiri dari 20 orang ASN dan 10 orang PPNPN.

### **2. Tugas dan Fungsi**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

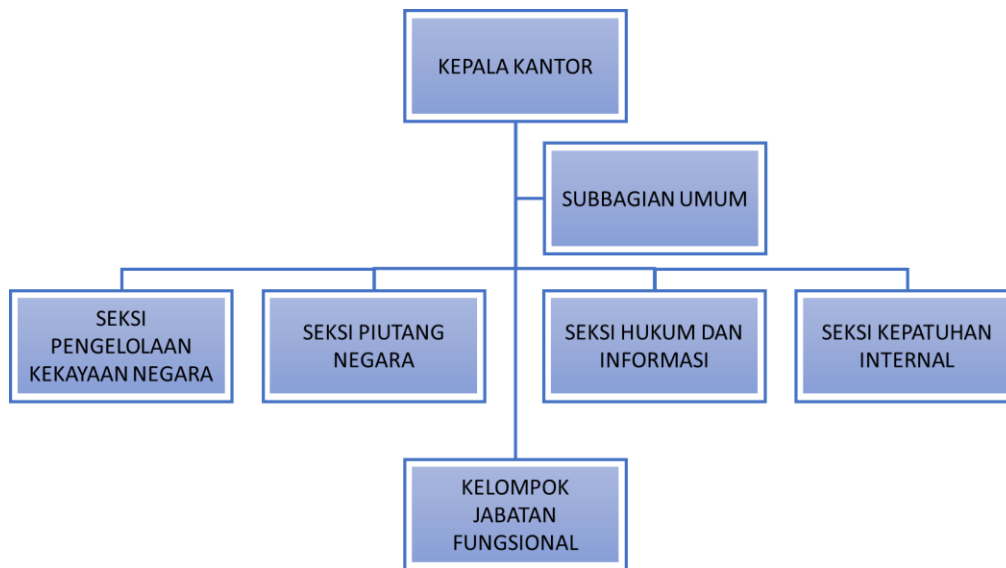
- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

- c. Registrasi, penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. Penyimpanan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan Piutang Negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta kekayaan lain;
- j. Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang;
- k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

### 3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Tarakan terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan, didukung oleh sumber daya manusia yang ada di KPKNL Tarakan tahun 2023 berjumlah 20 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I	-	-	0
2	II	1	3	4
3	III	7	8	15
4	IV	1	0	1
	Jumlah	9	11	20

2. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pegawai PNS	Pendidikan					Jumlah
		SLTA	DI	DIII	DIV/S-1	S2	
1.	Eselon 2	-	-	-	-	-	-
2.	Eselon 3	-	-	-	-	1	1
3.	Eselon 4	-	-	-	3	2	5
4.	Fungsional	-	-	-	5	-	5
5.	Pelaksana	-	1	3	5	-	9
	Jumlah	-	1	3	13	3	20

## **B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI**

KPKNL sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan Negara, pengurusan Piutang Negara dan pelayanan Lelang, KPKNL memiliki peran strategis berikut:

### **1. Pengelolaan Kekayaan Negara**

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Tarakan memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan kekayaan Negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan Negara. Peningkatan daya guna dan hasil terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan Negara, pengamanan kekayaan Negara dan penatausahaan kekayaan Negara. Sebagai *asset manager*, KPKNL Tarakan mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, serta penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Tarakan sebagai kantor operasional di daerah yang melayani langsung satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Tarakan dengan memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara antara lain: Portofolio Aset, Sertifikasi BMN, serta persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara.

### **2. Pelayanan Penilaian**

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi. Penilaian dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan BMN lain yang berada di lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi di bidang penilaian. Hasil penilaian kekayaan negara tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, pemindahtanganan BMN, dan pengurusan piutang negara (penilaian barang jaminan). Dengan demikian, hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien.

### **3. Pengurusan Piutang Negara**

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab lain yang sah.

Akan tetapi, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, piutang macet yang berasal dari BUMN tidak diserahkan lagi pengurusan kepada PUPN melalui KPKNL, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap Piutang Negara yang telah diserahkan dan Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun daerah.

#### **4. Pelayanan Lelang**

Pelayanan Lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Secara istilah, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului adanya Pengumuman Lelang. Selain itu, lelang merupakan bentuk pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan yang telah dilekatkan Hak Tanggungan dan eksekusi terhadap putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. KPKNL Tarakan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat selalu mengutamakan pelaksanaan lelang yang transparan, akuntabel, kompetitif, dan efisien. Diharapkan dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya terkait pengembangan *e-auction* dan *platform marketplace auction*, lelang dapat menjadi sarana transaksi pilihan masyarakat serta dapat berperan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

#### **5. Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Dalam melaksanakan Pengurusan Piutang Negara, KPKNL Tarakan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang memperoleh hasil berupa Bea Lelang termasuk Biaya Administrasi Balai Lelang yang selanjutnya disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan senantiasa memberikan pelayanan yang prima, KPKNL Tarakan diharapkan dapat menghasilkan PNBP dan merealisasikan potensi PNBP dari hasil pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan pengelolaan kekayaan negara. Sepanjang tahun 2023, KPKNL Tarakan telah berperan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana uraian tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada secara optimal.

### C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*) ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Tarakan memiliki beberapa permasalahan yang terjadi di tahun 2023, yaitu:

#### 1. Pengelolaan Kekayaan Negara

- Satuan Kerja belum tersosialisasi pentingnya Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN yang berpengaruh pada Nilai IPA (Indeks Pengelolaan Aset di tingkat Pengguna Barang;
- Lokasi aset BMN pada Satuan Kerja tidak mendukung dilakukannya pemanfaatannya karena berada di luar area komersial;
- Pembangunan Bangunan Gedung Kantor sebelum terbitnya ketentuan PMK 172/KMK.06/2020 tentang SBSK sehingga ketika dihitung dengan ketentuan nilainya belum optimal;
- BMN berupa Tanah masih belum bersertifikat atas nama Pemerintah RI Cq, KL atau belum mempunyai legalitas hukumnya;
- Terdapat perbedaan kondisi BMN yang tercatat dengan kondisi di lapangan;
- Satker terlambat menindaklanjuti Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara;
- Calon Penyewa Batal/tidak sanggup membayar; dan
- Belum menemukan Calon Penyewa/Mitra.

#### 2. Pengurusan Piutang Negara

- Mayoritas BKPN tidak memiliki barang jaminan, barang jaminan tidak marketable;
- Debitur/penanggung hutang tidak diketahui alamatnya; dan
- Debitur tidak rutin mengangsur.

#### 3. Layanan Lelang

- Banyaknya lelang yang TAP (Tidak Ada Peminat) untuk jenis objek lelang berupa tanah dan bangunan dikarenakan nilai limit yang masih tinggi dan objek lelang berpenghuni sehingga berimbas pada realisasi PNBPN Lelang dan Realisasi Pokok Lelang dan
- Banyak yang belum paham dan mengerti dalam hal pengajuan lelang online dikarenakan sering bergantinya PIC lelang disisi pemohon lelang.

#### 4. Layanan Penilaian

- Deviasi terjadi ketika nilai wajar dari penilai tidak digunakan sebagai dasar nilai dalam persetujuan pemindahtanganan atau pemanfaatan BMN, hal ini biasanya terjadi karena usulan satker lebih tinggi dari nilai wajar dan
- Beberapa objek penilaian memiliki kategori objek yang tidak dapat dinilai oleh Penilai Pemerintah KPKNL Tarakan.

## 5. Pengelolaan Sumber Daya

### a. Sumber Daya Manusia

- Jadwal pelaksanaan pelatihan tumpang tindih dengan penugasan pegawai;

### b. Anggaran

- Indikator Deviasi Hal. III Dipa, Penyerapan, dan Pengelolaan UP/TUP yang tidak maksimal pada IKPA dan
- Nilai indikator Efisiensi kurang maksimal pada SMART DJA

### c. Pengelolaan BMN dan pengadaan

- Frekuensi perubahan anggaran yang cukup tinggi dan berpengaruh pada perubahan nilai pada paket pengadaan.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis KPKNL Tarakan**

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara. Salah satu kondisi yang menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 adalah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia.

Berbagai upaya pencegahan penyebaran Novel Coronavirus telah dilakukan mengingat virus tersebut tidak hanya membahayakan kesehatan manusia tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan sistem keuangan. Sebagai respons atas hal tersebut, Pemerintah

telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Lebih lanjut, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak pada proses bisnis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan, penyesuaian proses bisnis terkait lelang dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan sekaligus melindungi pegawai dan stakeholders di masa pandemi melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Lelang pada KPKNL dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Selain itu, penyesuaian proses bisnis terkait Piutang Negara juga dilakukan melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Selanjutnya, proses bisnis terkait pelayanan Penilaian juga dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Penilaian dan Analisis di Bidang Penilaian dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Mengingat dampak pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan dirasakan selama beberapa tahun ke depan, Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai dokumen perencanaan jangka menengah telah mencantumkan berbagai respons yang diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Respons tersebut berupa strategi-strategi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dirumuskan untuk mencapai kondisi-kondisi yang diinginkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra ini. Strategi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selain dari sisi arah kebijakan dan strategi, target pada indikator kinerja dalam Renstra ini juga mempertimbangkan kondisi terkini yang diperkirakan akan berdampak pada realisasi target kinerja sehingga diperoleh proyeksi yang lebih realistis, mengingat pandemi Covid-19 akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi nasional dalam jangka menengah. Perubahan asumsi dan skenario dalam

perhitungan indikator menjadi salah satu pokok perhatian dalam merumuskan target yang digunakan sebagai indikator kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN yaitu, "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Pengertian profesional dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pengelola Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan, dan adaptif. Penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Kontributif** berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional;
- b. **Instrumental** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi;
- c. **Otoritatif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan di replikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional.
- d. **Berkelanjutan** diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum;
- e. **Adaptif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya;

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
  - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
  - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal;
- b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
- c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
- d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh DJKN. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi DJKN yang akan ditempuh adalah:

### **1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial**

Kondisi yang ingin dicapai dalam Arah Kebijakan ini adalah:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal;
- b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal adalah:

- a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh Kementerian/Lembaga;
- b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
- c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara (Omnibus Law);
- d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas;

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya adalah:

- a. Peningkatan kapasitas SDM, perbaikan bisnis proses dan perangkat analisis Investasi Pemerintah;
- b. *Cross function* unit vertikal DJKN/Kementerian Keuangan (DJP/DJBC/DJPB) dan SMV Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program kerja SMV.

### **2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya**

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah pengelolaan lelang yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah:

- a. Pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *ecommerce* baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan *startup* di bidang *marketplace*.
- b. pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern.

### 3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- a. pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara.
- b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

### 4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah
- d. Komunikasi publik yang efektif

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah:

- a. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
- b. Penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi;
- c. Pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas;

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan *IT-Based Service* Kekayaan Negara;
- b. Pengembangan pusat data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan;
- c. Peningkatan kapabilitas tata kelola TIK DJKN.

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DJKN melaksanakan program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, DJKN harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat Kantor Vertikal. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

## B. Kontrak Kinerja KPKNL Tarakan

Dengan adanya penataan organisasi sebagai salah satu pilar dalam reformasi birokrasi, diharapkan bahwa pencapaian target penerimaan negara dan pelayanan kepada masyarakat akan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Untuk mendukung hal tersebut, setiap kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diinstruksikan untuk menetapkan indikator dan target kinerja yang menjelaskan keberhasilan pencapaian kinerja baik berupa hasil (*output*)

maupun manfaat (*outcome*). Penetapan indikator dan target kinerja tersebut dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

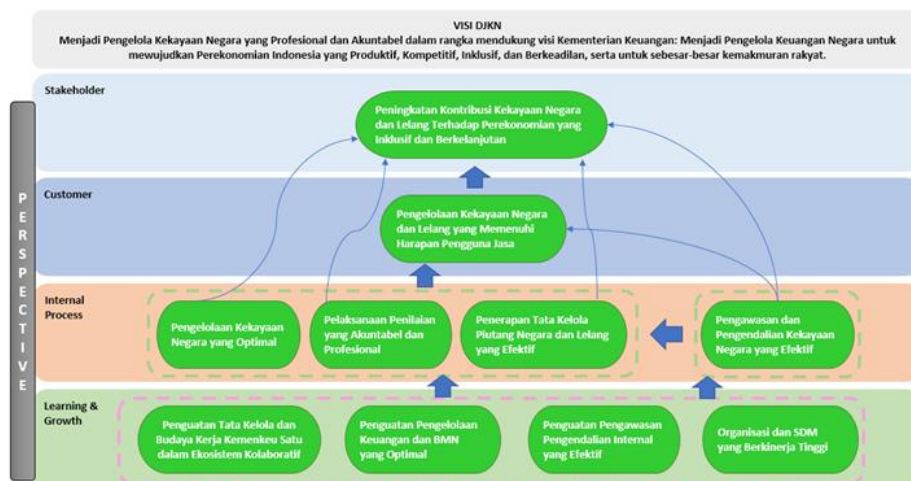
Perencanaan kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima dengan tetap menjaga integritas dan mempersembahkan kinerja terbaik di lingkungan instansi tersebut berada. Dalam mengemban tugas dan fungsi, KPKNL Tarakan mempunyai **visi dan misi** yang sejalan dengan visi dan misi Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara yang merupakan kristalitasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN yaitu, **”Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”**

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, KPKNL Tarakan menuangkan perencanaan kinerja tahun 2023 dalam sebuah Kontrak Kinerja KPKNL Tarakan Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dan Kepala KPKNL Tarakan sebagai berikut.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan, akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### PETA STRATEGI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN**  
**KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Pengelolaan Barang Milik Negara yang Optimal	89,33%
		3b-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		4b-CP Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
		5b-CP Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%
		5c-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
		8c-N Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	10%
9	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	9a-CP Indeks Integritas Organisasi	94,33
		9b-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
		10b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%

Program/Kegiatan	Anggaran
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>322.346.000</b>
Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	6.024.000
Pengelolaan Aset	316.322.000
<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>1.655.441.000</b>
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.642.091.000
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	7.410.000
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	5.940.000

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAkan  
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan</b>							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	80%	80%	80%	80%
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal</b>							
3a-CP	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Optimal	12%	40,67 %	40,67%	63,33%	63,33%	89,33%	89,33 %
3b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
<b>4</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>							
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
4b-CP	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
<b>5</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>							
5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
5c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
<b>6</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif</b>							
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	50%	86%	86%
<b>7</b>	<b>Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif</b>							
7a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	100	100	100	100	100	100
<b>8</b>	<b>Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal</b>							
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
8c-N	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	-	-	-	-	-	10%	10%
<b>9</b>	<b>Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif</b>							
9a-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	94,33	94,33
9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	-	-	60	60
<b>10</b>	<b>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</b>							
10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
10b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%

Pada Kontrak Kinerja KPKNL Tarakan Tahun 2023 terdapat *addendum* atas target dan/atau *trajectory* pada IKU, menjadi:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang <b>Akuntabel</b> , Inklusif, dan Berkelanjutan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%
		1c-CP Indeks Integritas	88,67
2		2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	84%
		3b-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		4b-CP Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola <b>Kekayaan</b> Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
		5b-CP Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%
		5c-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
		8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
		8d-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
9	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	9a-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
		10b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%

## BAB III AKUNTABILITAS KERJA

### A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Pada Tahun 2023 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Tarakan mencapai 111,64% dan masuk kategori hijau, di mana dari 20 (dua puluh) IKU terdapat 1 (satu) IKU yang masuk kategori kuning dengan rincian sebagai berikut:

K-WIDE	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan							
	1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Maximize / TLK
Realisasi	2.948.835.029	6.105.503.910	6.105.503.910	8.366.759.380	8.366.759.380	11.252.006.335	11.252.006.335	
Capaian	29,08%	60,21%	60,21%	82,11%	82,11%	110,42%	110,42%	

K-WIDE	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan							
	1b-CP persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	80%	80%	80%	80%	Maximize / TLK
Realisasi	56,10%	65,23%	65,23%	85,13%	85,13%	105,04%	105,04%	
Capaian	70,13%	81,53%	81,53%	106,42%	106,42%	131,25%	131,25%	

K-WIDE	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan							
	1c-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target						88,67	88,67	Maximize / TLK
Realisasi						89,17	89,17	
Capaian						89,17	89,17	

K-WIDE	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	70%	Maximize / TLK
Realisasi	12.157.519.349	34.633.996.574	34.633.996.574	76.933.812.115	76.933.812.115	135.848.256.078	135.848.256.078	
Capaian	8,36%	23,80%	23,80%	52,88%	52,88%	93,37%	93,37%	

K-WIDE	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Maximize / TLK
Realisa	200.540.236	319.598.390	319.598.390	928.282.813	928.282.813	1.029.668.459	1.029.668.459	
Capaian	26,74%	42,61%	42,61%	123,77%	123,77%	110,92%	110,92%	

K-WIDE	3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	3a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	12%	40,67%	40,67%	57,5%	57,5%	84,0%	84,0%	Maximize / TLK
Realisasi	21,25%	53,52%	53,52%	70,83%	70,83%	99,26%	99,26%	
Capaian	21,25%	53,52%	53,52%	70,26%	70,26%	99,26%	99,26%	

K-WIDE	3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	3b-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Maximize / TLK
Realisasi	2	3	3	12	12	13	13	
Capaian	20,00%	30,00%	30,00%	120%	120%	108%	108%	

K-WIDE	4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Minimize / TLK
Realisasi	2,43%	0,81%	0,81%	0,40%	0,40%	0,43%	0,43%	
Capaian	2,43%	0,81%	0,81%	0,40%	0,40%	0,43%	0,43%	

K-WIDE	4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	4b-CP Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	70	70	70	70	70	70	70	Maximize / TLK
Realisasi	95,00	97	96	98	97	99	98	
Capaian	95	96,67	95,83	97,58	96,71	98,61	97,66	

K-WIDE	5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	Maximize / TLK
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

K-WIDE	5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5b-CP Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%	Maximize / TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

K-WIDE	5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5c-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target				75%	75%	100%	100%	Minimize / TLK
Realisasi				94,67%	94,67%	116,71%	116,71%	
Capaian				94,67%	94,67%	116,71%	116,71%	

K-WIDE	6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	6a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target		50%	50%	-	50%	86%	86%	Maximize / Average
Realisasi		83,87%	83,87%	83,87%	83,87%	100,00%	100,00%	
Capaian		97,52%	97,52%		97,52%	100%	100%	

K-WIDE	7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	7a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target						80	80	Maximize / TLK
Realisasi						100	100,00	
Capaian						100	100	

K-WIDE	8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	100	100	100	100	Maximize / TLK
Realisasi	100%	97,10%	95,5%	98,10	98,12	112,48	112,48	
Capaian	100%	97,10%	95,5%	98,10	98,12	112,48	112,48	

K-WIDE	8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
	8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target				-	-	100%	100%	Maximize / TLK
Realisasi						127,00%	127,00%	
Capaian						127,00%	127,00%	

K-WIDE	8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
	8d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	Minimize / TLK
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

K-WIDE	9. Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
	9a-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target						60,00	60	Maximize / Average
Realisasi						99,14	99,14	
Capaian						99,14	99,14	

K-WIDE	10. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	10a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target						80,00	80	Maximize / TLK
Realisasi						85,49	85,49	
Capaian						85,49	85,49	

K-WIDE	10. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	10b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Maximize / TLK
Realisasi	45,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	
Capaian	54,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%	

Untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2023, 1 (satu) IKU yang kategori kuning yaitu persentase realisasi pokok lelang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Banyak lelang yang tidak laku terjual (lelang UUHT)
2. Objek lelang tidak *marketable*
3. Terdapat kebijakan baru dari Pegadaian (*rollover/perpanjangan utang*) perubahan jadwal lelang dari 1 bulan 2 kali menjadi 1 bulan 1 kali

1. Membandingkan Target Awal Tahun dan Realisasi Kinerja Tahun ini

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	110,42%	110,42%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%	105,04%	120,00%
		1c-CP Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	93,37%	93,37%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	110,92%	110,92%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Pengelolaan Barang Milik Negara yang Optimal	89,33%	99,26%	118,17%
		3b-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	108,33%	108,33%
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	0,43%	120,00%
		4b-CP Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	97,66	120,00%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	100,00%	106,38%
		5b-CP Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	100,00%	116,28%
		5c-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	116,71%	116,71%
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	100,00%	116,28%
7.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	80	100	120,00%
8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00	112,48	112,48%
		8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	127,00%	120,00%
		8c-CP Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	0,00%	120,00%
9.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	9b-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	99,14	120,00%

10.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	85,49	106,86%
		10b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120,00%	120,00%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023 : Rp 2.007.707.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 : Rp 1,688,986,366

2. Membandingkan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Periode Sebelumnya

a. Capaian Kinerja Dalam Kurun Waktu Sampai Dengan Lima Tahun Terakhir

Meskipun terdapat IKU yang sama di setiap tahunnya, namun secara target, perhitungan, sasaran strategis, dan perspektif dapat berbeda untuk IKU yang sama. Namun apabila dibandingkan dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Tarakan, pada tahun 2019 diperoleh NKO sebesar 112,40%, tahun 2020 sebesar 107,77%, tahun 2021 sebesar 113,13%, tahun 2022 sebesar 115,31%, dan pada tahun 2023 sebesar 111,64%, dapat disampaikan tabel perbandingan (dalam persentase pencapaian target) sebagai berikut:

K-WIDE	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan										K E T
	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023		
Target	100,0%	11.797.645.324	100,00 %	11.652.233.369	100,0%	8.940.000.000	100%	7.362.000.000	100%	10.190.000.000	
Target Adendum				9.486.000.000							
Realisasi	1660,89%	327.861.232.607	101,63 %	9.640.343.363	141,54 %	12.653.982.723	148,47 %	10.930.549.214	110,42 %	11.252.006.335	
Capaian	120,00 %		101,63 %		120,00 %		120,00%		110,42%		

K-WIDE	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian inklusif dan berkelanjutan										K E T
	1b-CP Persentase Produktivitas Lelang										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023		
Target	32,0%		34,00%		35,00%		36,00%		80%		
Realisasi	37,30%		58,40%		52,31%		55,60%		105,04 %		
Capaian	116,57 %		120,00 %		120,00 %		120,00 %		120,00 %		

K-WIDE	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian inklusif dan berkelanjutan										K E T
	1c-CP Indeks Integritas										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023		
Target									88,67		
Realisasi									89,17		
Capaian									100,56 %		

K-WIDE	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa										K E T
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023		
Target	100,0%	79.329.000.000	100,0%	92.000.000.000	100,0%	91.000.000.000	100,0%	91.000.000.000	100%	145.500.000.000	
Realisasi	88,99%	70.592.700.855	177,44 %	163.246.548.158	158,10 %	143.870.208.666	158,10 %	143.870.208.666	93,37%	135.848.256.078	
Capaian	111,34%		88,99%		120,00%		120,00%		93,37%		

K-WIDE	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa										K E T
	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023		
Target			5,0%	1.022.946.365	100,0%	1.000.000.000	100,0%	114.000.000	100%	750.000.000	
Target Adendum								605.000.000		928.282.813	
Realisasi			6,23%	63.691.267	181,00 %	1.806.550.615	223,78 %	1.353.848.344	110,92 %	1.029.668.459	
Capaian			120,00 %		120,00 %		120,00%		110,92%		

K-WIDE	3. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal										K E T
	3a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023		
Target									84,00%		
Realisasi									99,26%		
Capaian									118,17 %		

K-WIDE	3. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal										K E T
	3b-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023		
Target			100,0%	7	100,0%	37	100,0%	18	100%	10	
Target Adendum										12	
Realisasi			157,14 %	11	110,81 %	41	122,22 %	22	108,33 %	13	
Capaian			120,00%		110,81%		120,00%		108,33%		

K-WIDE	4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional										
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian										K E T
T/R	2019		2020		2021		2022		2023	
Target			30,00%		22,00%		19,00%		25%	
Realisasi			0,08%		0,00%		0,00%		0,43%	
Capaian			120,00 %		120,00 %		120,00 %		120,00 %	

4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional										K E T
4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023	
Target									70	
Realisasi									97,66	
Capaian									120,00 %	

5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif										K E T
5a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023	
Target	90,0%		90,0%		92,0%		92,0%		94%	
Realisasi	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
Capaian	111,11 %		111,11 %		108,70 %		108,70 %		106,38 %	

5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif										K E T
5b-CP Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023	
Target									86%	
Realisasi									100,00 %	
Capaian									116,28 %	

5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif										K E T
5c-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023	
Target									100%	
Realisasi									116,71 %	
Capaian									116,71 %	

6. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif										K E T
6a-CP Tingkat tindak lanjut persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023	
Target	70,0%		80,0%		85,0%		85,0%		86%	
Realisasi	70,0%		90,91%		95,24%		91,89%		100,00 %	
Capaian	100,00 %		113,64 %		112,04 %		108,11 %		116,28 %	

K-WIDE	7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif										K E T
	7a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023		
Target									80,00		
Realisasi									100,00		
Capaian									120,00 %		

K-WIDE	8. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal										K E T
	8a-CP Indeks kualitas pelaksanaan anggaran										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023		
Target	95,0%		95,0%		95,5%		95,5%		100		
Realisasi	95,74%		96,02%		94,14%		94,40%		112,48		
Capaian	100,78 %		101,07 %		98,58%		98,85%		112,48 %		

K-WIDE	8. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal										K E T
	8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023		
Target	100,0%						100,00 %		100%		
Realisasi	100,0%						160,97 %		127,00 %		
Capaian	100,00 %						120,00 %		120,00 %		

K-WIDE	8. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal										K E T
	8d-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023		
Target					12,5%		10,0%		15%		
Realisasi					0,00%		0,00%		0,00%		
Capaian					120,00 %		120,00 %		120,00 %		

K-WIDE	9. Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif										K E T
	9b-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023		
Target									60,00		
Realisasi									99,14		
Capaian									120,00 %		

K-WIDE	10. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi										K E T
	10a-N Persentase Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023		
Target									80,00		
Realisasi									85,49		
Capaian									106,86 %		

K-WIDE	10. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi										K E T
	10b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai										
T/R	2019		2020		2021		2022		2023		
Target	87,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100%		
Realisasi	95,46%		120,00%		120,00%		120,00%		120,00%		
Capaian	109,72%		120,00%		120,00%		120,00%		120,00%		

b. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Apabila dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) maka dapat disampaikan tabel perbandingan sebagai berikut:

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				Target dalam RPJM (2020-2024)
		2020	2021	2022	2023	
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	9.640 Miliar	12.653 Miliar	148,47%	110,42%	100%
	Persentase Produktivitas Lelang	73 Lelang Laku dari 125 Lelang (58,40%)	73 Lelang Laku dari 135 Lelang (52,31%)	55,60%	105,04%	34%
	Indeks Integritas	-	-	-	89,17	91,5 (skala 100)
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70.592 Miliar (88,99%)	163.246 Miliar (177,44%)	158,10%	93,37%	100%
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	63 Juta (6,23%)	1.806 Miliar (180,66%)	223,78%	110,92%	Tidak ada target dalam RPJM
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	-	-	-	99,26%	Tidak ada target dalam RPJM
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	11 BKPN (157,14%)	41 BKPN (110,81%)	122,22%	108,33%	100%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	0,08%	0,00%	0,00%	0,43%	27%
	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang	-	-	-	97,66	Tidak ada target

	Agile, Efektif dan Efisien					dalam RPJM
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	100%	100%	100%	100,00%	Tidak ada target dalam RPJM
	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	-	-	-	100,00%	Tidak ada target dalam RPJM
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	92 (100%)	27 (100%)	100%	116,71%	Tidak ada target dalam RPJM
Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	100,00%	80%
Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	-	-	-	100,00	Tidak ada target dalam RPJM
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,02%	94,14%	94,40%	112,48	95%
	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	127,00%	80%
	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	-	0%	0%	0,00%	Tidak ada target dalam RPJM
Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	99,14	Tidak ada target dalam RPJM
Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	85,49	Tidak ada target dalam RPJM
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	120%	120%	120%	120,00%	Tidak ada target dalam RPJM

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Rencana Kerja Kemenkeu Tahun 2023

Apabila dibandingkan dengan Rencana Kerja Kemenkeu Tahun 2023 maka dapat disampaikan tabel perbandingan sebagai berikut:

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target dalam Renja 2023	
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	110,42%	100%	
	Persentase Produktivitas Lelang	105,04%	Tidak ada target dalam Renja	
	Indeks Integritas	89,17	91,5	
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	93,37%	Tidak ada target dalam Renja	
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	110,92%	Tidak ada target dalam Renja	
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	71,96%	Tidak ada target dalam Renja
		Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	126,56%	
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	108,33%	Tidak ada target dalam Renja	
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	0,43%	Tidak ada target dalam Renja	
	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	97,66	Tidak ada target dalam Renja	
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	100,00%	Tidak ada target dalam Renja	
	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	100,00%	Tidak ada target dalam Renja	
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	116,71%	Tidak ada target dalam Renja	
Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	100,00%	Tidak ada target dalam Renja	

Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	100,00	Tidak ada target dalam Renja
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	112,48	Tidak ada target dalam Renja
	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	127,00%	Tidak ada target dalam Renja
	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	0,00%	Tidak ada target dalam Renja
Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	99,14	Tidak ada target dalam Renja
Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	85,49	Tidak ada target dalam Renja
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	120,00%	Tidak ada target dalam Renja

### 3. Upaya-upaya effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Tarakan melakukan beberapa upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja di tahun 2023, yaitu:

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan		
Kode	IKU	Upaya <i>Extra Effort</i> yang Dilakukan
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Sosialisasi, koordinasi kepada penyerah piutang dan debitur, menerbitkan PSBDT bagi debitur yang tidak diketahui keberadaannya yang tidak memiliki barang jaminan, pemanggilan debitur dengan mengoptimalkan anggota PUPN.</li> <li>- Melakukan penggalan potensi lelang yaitu sosialisasi terkait peraturan lelang kepada pengguna jasa lelang (pemohon lelang maupun masyarakat umum calon peserta lelang) melalui media sosial dan tatap muka langsung</li> </ul>
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	Melakukan penggalan potensi lelang yaitu sosialisasi terkait peraturan lelang kepada pengguna jasa lelang (pemohon lelang maupun masyarakat umum calon peserta lelang) melalui media sosial dan tatap muka langsung.
1c-CP	Indeks Integritas	Melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi antikorupsi dan transparansi dengan sebaik-baiknya.
Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Melakukan penggalan potensi lelang yaitu sosialisasi terkait peraturan lelang kepada pengguna jasa lelang (pemohon lelang maupun masyarakat umum calon peserta lelang) melalui media sosial dan tatap muka langsung
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Melakukan Sosialisasi, koordinasi kepada penyerah piutang dan debitur, menerbitkan PSBDT bagi debitur yang tidak diketahui keberadaannya yang tidak memiliki barang jaminan, pemanggilan debitur dengan mengoptimalkan anggota PUPN

Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal		
3a-CP	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Optimal	Melakukan Sosialisasi dalam bidang Pengelolaan BMN, koordinasi kepada Satuan Kerja dengan mendorong untuk melakukan Optimalisasi dengan cara memaksimalkan penggunaannya, melakukan pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa atas area yang belum digunakan berdasarkan hasil perhitungan SBSK dan melakukan pensertifikatan BMN berupa Tanah yang belum mempunyai legalitasnya
3b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	Menerbitkan PSBDT terhadap BKPN yang tidak memiliki barang jaminan dan debitur/penanggung hutang tidak diketahui keberadaannya, sosialisasi kepada debitur terkait keringanan hutang
Sasaran Strategis 4: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional		
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Melakukan koordinasi dengan Seksi PKN terkait usulan nilai limit dari satker dan menyampaikan usulan untuk peninjauan kembali terkait adanya IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian
4b-CP	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJKN Kaltimara terkait bantuan teknis dan tenaga penilai
Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif		
5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-
5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	Mentoring tata cara permohonan lelang online kepada pengguna jasa lelang (pemohon lelang)
5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Melakukan penggalian data pendukung untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja BMN yang sesuai dengan kondisi riil.
Sasaran Strategis 6: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif		
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	Monitoring melalui update data SIMAN dan Penerimaan PNPB melalui ONSPAM secara Bulanan
Sasaran Strategis 7: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif		
7a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	-
Sasaran Strategis 8: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal		
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Prognosa Anggaran</li> <li>- Menyusun Simulasi Perhitungan IKU IKPA dan SMART DJA</li> <li>- Melakukan optimalisasi anggaran</li> <li>- Melakukan penyesuaian RPD</li> <li>- Melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran</li> <li>- Menyediakan alat bantu monitoring pelaksanaan anggaran yang <i>up to date</i> bagi seluruh pejabat pengelola keuangan dan para pemegang peran manajerial</li> </ul>
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan semua aset telah ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>- Berkoordinasi dengan PPK, Pejabat Pengadaan dan Staf PPK dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah</li> </ul>
8c-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	Melakukan koordinasi dengan Bendahara Penerimaan dan Kanwil DJKN Kaltimara
Sasaran Strategis 9: Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif		
9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Pemetaan pelaksanaan dan pengumpulan data terhadap 11 elemen tersebut

Sasaran Strategis 10: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi		
10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	Melaksanakan dan melaporkan kegiatan reviu pengelolaan kinerja dan reviu manajemen risiko tepat waktu
10b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Menyampaikan reminder secara rutin agar pegawai mengajukan usulan pelatihan setiap bulan

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan KPKNL Tarakan dalam menjalankan tugas dan fungsi tidak terlepas dari strategi maupun langkah langkah yang telah direncanakan oleh masing-masing seksi. Berikut analisis keberhasilan maupun alternatif solusi yang telah dilakukan KPKNL Tarakan:

Kode	IKU	Analisis Penyebab Keberhasilan Kerja Tahun 2023	Alternatif Solusi yang telah dilakukan
Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan			
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	- Sosialisasi, penagihan dengan melibatkan anggota PUPN - melakukan Penggalan Potensi Lelang kepada pemohon lelang	- Pemanggilan Debitur/penanggung hutang dengan mengoptimalkan anggota PUPN - Penggalan Potensi Lelang kepada pemohon lelang dan sosialisasi lelang kepada masyarakat umum melalui media sosial
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	Melakukan Penggalan Potensi Lelang kepada pemohon lelang	Penggalan Potensi Lelang kepada pemohon lelang dan sosialisasi lelang kepada masyarakat umum melalui media sosial
1c-CP	Indeks Integritas	Melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi antikorupsi dan transparansi dengan sebaik-baiknya	Internalisasi integritas dalam pelaksanaan tugas
Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	melakukan Penggalan Potensi Lelang kepada pemohon lelang	Penggalan Potensi Lelang kepada pemohon lelang dan sosialisasi lelang kepada masyarakat umum melalui media sosial
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Sosialisasi, penagihan dengan melibatkan anggota PUPN	Pemanggilan Debitur/penanggung hutang dengan mengoptimalkan anggota PUPN
Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal			

3a-CP	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong satuan kerja untuk melakukan optimalisasi penggunaan BMN</li> <li>- Melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja terkait, untuk proses percepatan sertipikasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL, Satuan Kerja, dan Kanwil DJKN Kaltimara, serta pihak lain yang terkait</li> <li>- Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL Tarakan, Kantor Pertanahan, Satuan Kerja dan pihak lain yang terkait</li> </ul>
3b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	Adanya sosialisasi keringanan hutang kepada debitur/penanggung hutang dan PSBDT	Pemanggilan Debitur/penanggung hutang dengan mengoptimalkan anggota PUPN
<b>Sasaran Strategis 4: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>			
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Koordinasi dengan Seksi PKN terkait usulan nilai limit dari satker	-
4b-CP	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	Melakukan identifikasi kewenangan atas objek yang dimohonkan	-
<b>Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>			
5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	-
5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	intens melakukan koordinasi dan sosialisai terkait permohonan lelang online kepada pengguna jasa lelang (pemohon lelang)	Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi tentang tatacara pengajuan permohonan online
5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL dan Satuan Kerja, serta pihak lain yang terkait	Koordinasi dengan Satuan Kerja dan pihak lain yang terkait
<b>Sasaran Strategis 6: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif</b>			
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL dan Satuan Kerja, serta pihak lain yang terkait	Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL dan Satuan Kerja, serta pihak lain yang terkait
<b>Sasaran Starategis 7: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif</b>			
7a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memantau permohonan PPID</li> <li>- Penyampaian Laporan PPID secara tepat waktu</li> </ul>	-
<b>Sasaran Strategis 8: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal</b>			
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Penyerapan Anggaran yang tidak mencapai target pada Triwulan kedua disebabkan adanya pergeseran wilayah kerja sedangkan perhitungan indikator penyerapan anggaran bersifat rollover sehingga menyebabkan nilai sampai Triwulan IV tidak maksimal</li> <li>- Adanya keterlambatan dalam penetapan revisi anggaran kewenangan DJA dikarenakan pergesearan wilayah menyebabkan besaran RPD aplikasi SPAN pada Triwulan III masih belum termutakhirkan menyebabkan Nilai Deviasi melebihi batas 5%</li> <li>- Pengajuan GUP yang kurang proporsional antaran besaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pemutakhiran RPD Bulanan</li> <li>- Melaksanakan pemutakhiran revisi anggaran</li> </ul>

		GUP dengan jangkawaktu pengajuan - Kurangnya Optimalisasi Anggaran pada RO yang capaiannya tidak dapat melebihi 100% karena adanya beberapa	
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat	Melakukan pemutakhiran data paket pengadaan pada aplikasi SiRUP secara berkala segera setelah revisi anggaran disahkan
8c-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	Rekonsiliasi data PNBPFungsional antara OMSPAN dengan Dropbox Lelang	-
<b>Sasaran Strategis 9: Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif</b>			
9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait 1. Dukungan SDM, akses data dan informasi, komunikasi 2. EPITE, 3. PPITA, 4. PPKEKP, 5. FRS, 6. Penyusunan Profil Pegawai, 7. LPPI, 8. Jumlah Pengaduan Masyarakat, 9. Jumlah Operasi Tangkap tangan, 10. Kepuasan stakeholder, 11. Hasil Survei Penilaian Integritas tepat waktu	Penambahan pegawai di KI, mengikuti diklat terkait UKI
<b>Sasaran Strategis 10: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</b>			
10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	Menyusun peta strategi untuk pelaksanaan kegiatan reviu pengelolaan kinerja dan reviu manajemen risiko	Penambahan pegawai di KI, mengikuti diklat terkait UKI
10b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Banyak pelaksanaan diklat yang bisa diselesaikan oleh pegawai	-

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi. Efisiensi terdiri atas efisiensi output program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I dan efisiensi RO untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja.

Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi output program dan efisiensi RO antara lain capaian output program, capaian RO, pagu dalam DIPA terakhir, dan realisasi anggaran.

Data efisiensi pada KPKNL Tarakan untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No	Rincian Output	Target Volume Output	Satuan	Realisasi Volume Output	CRO	Efisiensi
1	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	63	Orang	185	2,94	3.238.800,00
2	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	50	Orang	67	1,34	2.870.000,00
3	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	45	Surat Persetujuan/Penolakan	117	2,60	13.743.000,00
4	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	6	BKPN	12	2,00	30.608.000,00
5	Risalah Lelang	110	Risalah Lelang	196	1,78	2.318.600,00
6	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	20	Risalah Lelang	20	1,00	13.859.000,00
7	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	51	Rekomendasi	116	2,27	22.061.000,00
8	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1	Rekomendasi	2	2,00	4.512.000,00
9	Rekomendasi Hasil Penilaian	1	Rekomendasi	2	2,00	6.963.600,00
10	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	504	Rekomendasi	550	1,09	43.808.746,03
11	Penggalian Potensi Lelang	1	Rekomendasi	5	5,00	19.103.000,00
12	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	192	Rekomendasi	237	1,23	20.594.700,00
13	Peralatan Fasilitas Perkantoran	5	Unit	5	1,00	3.645.000,00
14	Kendaraan Bermotor	1	Unit	1	1,00	1.500.000,00
15	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	12	1,00	167.626.534,00
16	Kerumahtanggaan	12	Bulan Layanan	12	1,00	10.254.600,00
17	Kehumasan	4	Kegiatan	4	1,00	3.346.000,00
18	Pembinaan/Edukasi Publik	50	Orang	50	1,00	681.000,00
19	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	Rekomendasi	5	1,00	2.927.000,00
CRO					169,78%	373.660.580,03
Efisiensi						18,61%

Dengan menggunakan metode perhitungan sesuai sesuai PMK 22/PMK.02/2021 dan ND-6/MK.1/2021 diperoleh nilai efisiensi KPKNL Tarakan sebesar **18,61%**. Sebagaimana data pada tabel di atas, efisiensi pada KPKNL Tarakan diperoleh dari efisiensi penggunaan anggaran dan/atau optimalisasi capaian output yang melebihi target yang ditetapkan dalam DIPA terutama pada beberapa output non generik.

## 6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

KPKNL Tarakan memiliki beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2023 untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Kode	IKU	Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja
<b>Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan</b>		
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	- Sosialisasi, penagihan dengan melibatkan anggota PUPN - Penggalan Potensi Lelang kepada pemohon lelang
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	Penggalan Potensi Lelang kepada pemohon lelang
1c-CP	Indeks Integritas	Menyampaikan laporan dan atau mengadakan sosialisasi/rapat rutin dengan tepat waktu
<b>Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>		
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Penggalan Potensi Lelang kepada pemohon lelang
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Sosialisasi, penagihan dengan melibatkan anggota PUPN
<b>Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal</b>		
3a-CP	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Optimal	- Melakukan pengukuran secara langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian data BMN - Berkoordinasi secara berkelanjutan dengan Satuan Kerja dan Kantor Pertanahan terkait, guna update informasi terkait kendala maupun progress sertifikasi.
3b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	Adanya sosialisasi keringanan hutang kepada debitur/penanggung hutang dan PSBDT
<b>Sasaran Strategis 4: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>		
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-
4b-CP	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	-
<b>Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>		
5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	Terus melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemohon Lelang mengenai keunggulan lelang online
5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	Koordinasi dan Sosialisasi tentang tatacara pengajuan permohonan online
5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Membuat dan membagikan form pendataan BMN kepada satuan kerja, mengumpulkan data pendukung, dan menginput data pada SIMAN Portofolio
<b>Sasaran Strategis 6: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif</b>		
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	Monitoring capaian dan Koordinasi dengan Satker serta Kanwil dan Kantor Pusat DJKN
<b>Sasaran Starategis 7: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif</b>		
7a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	- Memantau permohonan PPID - Penyampaian Laporan PPID secara tepat waktu

Sasaran Strategis 8: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal		
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	- Monitoring Rencana Penarikan Dana - Monitoring Realisasi Anggaran - Monitoring Capaian Output - Simulasi Pehitungan Nilai IKPA dan Smart DJA
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Monitoring progres realisasi pengelolaan BMN dan pengadaan
8c-CP	Deviasi Data PNBPNBP Fungsional DJKN	Rekonsiliasi data PNBPNBP Lelang PL I dan Pengadaan
Sasaran Strategis 9: Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif		
9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait 1. Dukungan SDM, akses data dan informasi, komunikasi 2. EPITE, 3. PPITA, 4. PPKEKP, 5. FRS, 6. Penyusunan Profil Pegawai, 7. LPPI, 8. Jumlah Pengaduan Masyarakat, 9. Jumlah Operasi Tangkap tangan, 10. Kepuasan stakeholder, 11. Hasil Survei Penilaian Integritas tepat waktu
Sasaran Strategis 10: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi		
10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, kualitas pelaksanaan kinerja, kualitas monev kinerja, kualitas edukasi, kualitas penyusunan profil dan piagam risiko, kualitas laporan pemantauan risiko triwulan, serta kualitas kegiatan pendukung
10b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Dilakukan monitoring capaian kinerja setiap bulan

## 7. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko

Risiko yang akan dimitigasi beserta tindak lanjut penanganannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk risiko satuan kerja belum tersosialisasi pentingnya Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN yang berpengaruh pada Nilai IPA (Indeks Pengelolaan Aset di tingkat Pengguna Barang, lokasi aset BMN pada satuan kerja tidak mendukung dilakukan pemanfaatannya karena berada di luar area komersial, pembangunan bangunan Gedung Kantor sebelum terbitnya ketentuan PMK 172/KMK.06/2020 tentang SBSK sehingga ketika dihitung dengan ketentuan nilainya belum optimal, dan BMN berupa Tanah masih belum bersertifikat atas nama Pemerintah RI Cq, KL atau belum mempunyai legalitas hukumnya, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara telah membuat dan membagikan *form* pendataan BMN kepada satuan kerja, mengumpulkan dokumen pendukung, dan melakukan perhitungan SBSK serta melakukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
- b. Untuk risiko objek lelang yang memiliki nilai limit tinggi serta masih berpenghuni, Pelayanan Lelang melakukan penggalan potensi lelang yaitu dengan sosialisasi terkait peraturan lelang kepada pengguna jasa lelang (pemohon lelang maupun masyarakat umum calon peserta lelang) melalui media sosial dan tatap muka langsung

- c. Untuk risiko Nilai indikator Deviasi Hal. III DIPA, Penyerapan, dan Pengelolaan UP/TUP yang tidak maksimal pada IKPA serta nilai indikator Efisiensi kurang maksimal pada SMART DJA, Subbagian Umum telah memitigasi risiko dengan monitoring RPD bulanan pada triwulan IV TA 2023.
- d. Untuk risiko pelaksanaan pelatihan bersamaan dengan penugasan tugas dan fungsi pegawai, Subbagian Umum telah memonitoring capaian kinerja setiap bulan dan meningkatkan penawaran kepada pegawai untuk mengikuti diklat
- e. Untuk risiko bahwa mayoritas BKPN tidak memiliki barang jaminan, tidak *marketable*, debitur/penanggung hutang tidak diketahui alamatnya, dan debitur tidak rutin mengangsur, Seksi Piutang Negara telah melakukan Sosialisasi, koordinasi kepada penyerah piutang dan debitur, menerbitkan PSBDT bagi debitur yang tidak diketahui keberadaannya yang tidak memiliki barang jaminan, serta pemanggilan debitur dengan mengoptimalkan anggota PUPN.

## 8. Rencana Aksi ke Depan

Rencana aksi KPKNL Tarakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kode	IKU	Rencana Aksi ke Depan
Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan		
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Sosialisasi, koordinasi kepada penyerah piutang dan debitur, menerbitkan PSBDT bagi debitur yang tidak diketahui keberadaannya yang tidak memiliki barang jaminan, pemanggilan debitur dengan mengoptimalkan anggota PUPN, melaksanakan lelang barang jaminan</li> <li>- Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh pengguna jasa lelang baik dari segi pemohon lelang maupun peserta lelang (masyarakat umum) secara tatap muka dan melalui media sosial</li> <li>- Secara intens melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait pengelolaan BMN</li> </ul>
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh pengguna jasa lelang baik dari segi pemohon lelang maupun peserta lelang (masyarakat umum) secara tatap muka dan melalui media sosial
1c-CP	Indeks Integritas	Melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi antikorupsi dan transparansi dengan sebaik-baiknya
Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh pengguna jasa lelang baik dari segi pemohon lelang maupun peserta lelang (masyarakat umum) secara tatap muka dan melalui media sosial
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Melakukan Sosialisasi, koordinasi kepada penyerah piutang dan debitur, menerbitkan PSBDT bagi debitur yang tidak diketahui keberadaannya yang tidak memiliki barang jaminan, pemanggilan debitur dengan mengoptimalkan anggota PUPN, melaksanakan lelang barang jaminan
Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal		

3a-CP	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan bimtek dan pengukuran langsung terhadap objek pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK</li> <li>- Melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja terkait, untuk proses percepatan sertipikasi.</li> </ul>
3b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	Melakukan sosialisasi, pemanggilan debitur/penanggung hutang, koordinasi dengan penyerah piutang, penerbitan PSBDT, melaksanakan lelang barang jaminan
<b>Sasaran Strategis 4: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>		
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Melakukan koordinasi dengan Seski PKN terkait usulan nilai limit dari satker
4b-CP	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	Menyelesaikan dan menyampaikan laporan penilaian sesuai ketentuan dan waktu yang berlaku.
<b>Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>		
5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	Terus melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemohon Lelang mengenai keunggulan lelang online
5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	Terus melakukan koordinasi dan sosialisasi mengenai pengajuan permohonan online kepada pemohon lelang
5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Direktorat PKKN, Kanwil DJKN Kaltimara, dan Satuan Kerja terkait
<b>Sasaran Strategis 6: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif</b>		
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-
<b>Sasaran Starategis 7: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif</b>		
7a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memantau permohonan PPID</li> <li>- Penyampaian Laporan PPID secara tepat waktu</li> </ul>
<b>Sasaran Strategis 8: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal</b>		
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan koordinasi terkait rencana kegiatan, rencana penggunaan dana, dan proyeksi optimalisasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi</li> <li>- Melakukan koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran</li> <li>- Menyusun langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan target capaian anggaran dan capaian output</li> </ul>
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemutakhiran data BMN pada aplikasi SIMAN secara berkala</li> <li>- Monitoring progres realisasi pengelolaan BMN dan pengadaan</li> <li>- Input realisasi pengadaan secara berkala</li> </ul>
8c-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	Rekonsiliasi data PNBPFungsional Lelang PL I dan Pegadaian antara OMSPAN dan Dropbox Lelang
<b>Sasaran Strategis 9: Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif</b>		
9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait 1. Dukungan SDM, akses data dan informasi, komunikasi 2. EPITE, 3. PPITA, 4. PPKEKP, 5. FRS, 6. Penyusunan Profil Pegawai, 7. LPPI, 8. Jumlah Pengaduan Masyarakat, 9. Jumlah Operasi Tangkap tangan, 10. Kepuasan stakeholder, 11. Hasil Survei Penilaian Integritas tepat waktu

Sasaran Strategis 10: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi		
10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, kualitas pelaksanaan kinerja, kualitas monev kinerja, kualitas edukasi, kualitas penyusunan profil dan piagam risiko, kualitas laporan pemantauan risiko triwulan, serta kualitas kegiatan pendukung
10b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Menyusun Individual Development Program Pegawai Periode Tahun 2024 dan mengusulkan pelatihan bagi pegawai setiap bulan

## B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program tahun 2023, dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran KPKNL Tarakan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

### 1. Pendapatan KPKNL TARAKAN

No.	Uraian	2023		
		Target	Realisasi	%
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	10.190.000.000	11.252.006.335	110,42%

### 2. Belanja KPKNL TARAKAN

No.	Uraian	2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	-	-	0,00%
2	Belanja Barang	1.949.351.000	1.635.775.366	83,91
3	Belanja Modal	-	-	-
	Jumlah belanja	58.356.000	53.211.000	91,18

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan pada BAB III bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja KPKNL Tarakan secara umum pada Tahun Anggaran 2023 adalah sangat baik. Semua target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan sangat baik, kecuali IKU Persentase realisasi pokok lelang. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023 tercapai sebesar 111,64%.

### **B. LANGKAH DI MASA MENDATANG**

Capaian kinerja dan prestasi KPKNL Tarakan yang sangat memuaskan harus menjadi motivasi bagi segenap pegawai untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang. KPKNL Tarakan senantiasa akan meningkatkan kinerja di tahun 2024 dengan cara sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara
  - Membuat dan membagikan form pendataan BMN kepada satuan kerja, mengumpulkan dokumen pendukung, dan melakukan perhitungan SBSK;
  - Melakukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
  - Melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan kasus aset BMN yang bersengketa.
2. Pengurusan Piutang Negara
  - Melakukan Sosialisasi, koordinasi kepada penyerah piutang dan debitur;
  - menerbitkan PSBDT bagi debitur yang tidak diketahui keberadaannya yang tidak memiliki barang jaminan; dan
  - pemanggilan debitur dengan mengoptimalkan anggota PUPN, melaksanakan lelang barang jaminan Layanan Lelang.
3. Layanan Penilaian
  - Melakukan verifikasi permohonan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Melakukan koordinasi dengan Seski PKN terkait usulan nilai limit dari satuan kerja; dan
  - Menyelesaikan dan menyampaikan laporan penilaian sesuai ketentuan dan waktu yang berlaku.
4. Layanan Lelang
  - Melakukan penggalan potensi lelang yaitu sosialisasi terkait peraturan lelang kepada pengguna jasa lelang (pemohon lelang maupun masyarakat umum calon peserta lelang) melalui media sosial dan tatap muka langsung;

- Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh pengguna jasa lelang baik dari segi pemohon lelang maupun peserta lelang (masyarakat umum) secara tatap muka dan melalui media sosial; dan
- Melakukan koordinasi dan sosialisasi mengenai pengajuan permohonan online kepada pemohon lelang.

## 5. Pengelolaan Sumber Daya

### a. Sumber Daya Manusia

- Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, kualitas pelaksanaan kinerja, kualitas monev kinerja, kualitas edukasi, kualitas penyusunan profil dan piagam risiko, kualitas laporan pemantauan risiko triwulan, serta kualitas kegiatan pendukung;
- Monitoring capaian kinerja setiap bulan dan meningkatkan penawaran kepada pegawai untuk mengikuti diklat; dan
- Melaksanakan pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi antikorupsi dan transparansi dengan sebaik-baiknya.
- Melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait dukungan SDM, akses data dan informasi, komunikasi, EPITE, PPITA, PPKEKP, FRS, penyusunan profil pegawai, LPPI, jumlah pengaduan masyarakat, jumlah operasi tangkap tangan, Kepuasan stakeholder, dan hasil survei penilaian integritas tepat waktu.

### b. Anggaran

- Melakukan koordinasi terkait rencana kegiatan, rencana penggunaan dana, dan proyeksi optimalisasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
- Melakukan koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran;
- Menyusun langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan target capaian anggaran dan capaian output;
- Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana secara Berkala; dan
- Pemantauan kesesuaian realisasi anggaran berdasarkan Rencana Penarikan Dana.

### c. Pengelolaan BMN dan pengadaan

- Strategi atas rencana aksi dan mitigasi risiko terhadap kemungkinan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kinerja telah mampu mengatasi potensi permasalahan sehingga kinerja yang dicapai dapat melampaui target yang telah ditetapkan.